

LECTURES: Journal of Islamic and Education Studies

Journal website: <https://lectures.pdfaii.org/>

E-ISSN : 2964-1470

DOI : <https://doi.org/10.58355/lectures.v3i1.72>


Vol. 3 No. 1 (2024)

pp. 27-34

Research Article

Model-model Pembiayaan Pendidikan Islam

Alif Basman

Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan, Indonesia; alifbasmanamrullah44@gmail.com 



Copyright © 2024 by Authors, Published by LECTURES: Journal of Islamic and Education Studies. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : December 11, 2023

Revised : February 15, 2024

Accepted : February 27, 2024

Available online : March 22, 2024

How to Cite: Alif Basman. (2024). Islamic Education Financing Models. *LECTURES: Journal of Islamic and Education Studies*, 3(1), 27-34. <https://doi.org/10.58355/lectures.v3i1.72>

Islamic Education Financing Models

Abstract. Educational administrators need to comprehend various models of educational funding as a guide in executing educational programs. The selection of funding models will impact the policies implemented by the administrators. When administrators exercise wisdom in selecting the appropriate funding model, it will influence the policies adopted and strategic steps taken in educational development. The method employed in this writing is a literature study (library research). The research conducted reveals that there are several models such as the Flat Grant Model, Foundation Plan Model, Guaranteed Tax Base Plan Model, Percentage Equalizing Model, Power Equalizing Plan Model, Full State Funding Model, Resource Cost Model, Choice and Voucher Plans Model, and Weight Student Plan Model, each with its distinct characteristics and impacts in allocating educational funds.

Keywords: Funding Models, Islamic Education

Abstrak. Pengelola pendidikan perlu memahami berbagai model pembiayaan pendidikan sebagai pedoman dalam menjalankan program pendidikan. Pemilihan model pembiayaan akan berdampak pada kebijakan yang diimplementasikan oleh pengelola. Ketika pengelola memiliki kebijaksanaan dalam memilih model pembiayaan yang tepat, hal itu akan memengaruhi kebijakan yang diambil serta langkah-langkah strategis dalam pengembangan pendidikan. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah studi kepustakaan (library research). Dari riset yang dilakukan memberikan hasil bahwa ada beberapa model seperti Model Dana Bantuan Murni, Model Landasan Perencanaan, Model Perencanaan Pokok Jaminan Pajak, Model Persamaan Persentase, Model Perencanaan Persamaan Kemampuan, Model Pendanaan Negara Sepenuhnya, Model Sumber Pembiayaan, Model Surat Bukti/Penerimaan, dan Model Rencana Bobot Siswa yang memiliki ciri khas dan dampaknya masing-masing dalam mengalokasikan dana pendidikan.

Kata Kunci: Model Pembiayaan, Pendidikan Islam

PENDAHULUAN

Pembiayaan untuk pendidikan Islam sebenarnya merupakan cara untuk mengalokasikan manfaat dan tanggung jawab kepada masyarakat. Hal ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan pendidikan yang bertujuan menciptakan sumber daya manusia yang unggul serta mewujudkan visi dan misi lembaga pendidikan. Fenomena ini telah terjadi pada masa Kekhalifahan, namun ada sedikit perbedaan di mana dalam perspektif Islam murni, pembiayaan pendidikan dibiayai oleh negara. Peran biaya dalam pendidikan sangatlah penting karena tanpa pembiayaan, pendidikan tidak dapat berjalan secara optimal. Tidak bisa disangkal bahwa pembiayaan memegang peran sentral dalam proses pelaksanaan pendidikan. Imam Syafi'i pernah menyatakan bahwa ada enam syarat untuk menuntut ilmu, di antaranya adalah ketersediaan biaya.¹

Pembiayaan pendidikan merupakan elemen penting yang mendukung keberhasilan proses pendidikan. Tanpa pendanaan yang memadai, kegiatan pendidikan sulit untuk berjalan dengan baik. Bahkan untuk memulai suatu kegiatan pun akan menjadi sulit tanpa adanya dukungan keuangan. Meskipun banyak pakar yang menyatakan bahwa pendanaan bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan, namun keberadaan pendanaan pendidikan menjadi bukti nyata akan kesungguhan para pengelola pendidikan dalam menjalankan lembaga pendidikan secara efektif dan efisien.²

Standar yang ditegakkan oleh pemerintah memiliki tujuan untuk menjadikan pendidikan sebagai sarana untuk menghasilkan generasi penerus bangsa yang memiliki kualitas yang baik. Pendidikan merupakan kemampuan lembaga

¹ Muhammad Adam Dzuhri Ahmad Firdaus Al amien, Siti Julaiha, 'PEMBIAYAAN PENDIDIKAN ISLAM; HISTORIS, PENGERTIAN, FUNGSI, DAN SUMBER', *Jurnal Syntax Transformation*, 2 (2021), 749-50.

² Usman, 'Urgensi Manajemen Pembiayaan Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah', *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*, 2 (2017), 219- 246.

pendidikan dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar sebaik mungkin.³

Pada masa kejayaan Islam di masa lampau, sistem pendidikan mereka menjadi sorotan dunia karena menghasilkan para tokoh yang mahir di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Mereka lahir dan dididik di lembaga pendidikan yang sangat berkualitas pada masanya. Contohnya adalah madrasah Nidhomiyah, yang diinisiasi oleh penguasa pada masa itu, Nizham al-Mulk. Madrasah ini menyebar ke berbagai wilayah seperti Baghdad, Naisapur, Isfahan, Bashra, dan Mosul.

Pembiayaan pendidikan pada intinya fokus pada distribusi manfaat dan tanggungan yang harus dipikul oleh masyarakat. Secara sederhana, biaya merujuk pada sejumlah uang yang dikeluarkan atau layanan yang diberikan kepada siswa. Pembiayaan pendidikan terkait dengan distribusi beban pajak dari beragam jenis pajak yang dikenakan pada masyarakat, serta cara pengalihan pajak ke sekolah.⁴

Keberhasilan sebuah lembaga pendidikan dalam mencapai tujuan nasional pendidikan serta tujuan sekolahnya, yang sesuai dengan visi dan misinya, tak lepas dari perencanaan pendidikan secara keseluruhan, termasuk manajemen pendanaan. Perencanaan pendidikan dalam lingkup yang luas dan tingginya biaya pendidikan saling berhubungan dan memengaruhi satu sama lain. Kualitas pendidikan pada dasarnya sejalan dengan biaya yang dikeluarkan; semakin tinggi biaya yang diinvestasikan, semakin baik pula layanan pendidikan yang dapat diberikan, serta semakin mungkin mencetak lulusan dengan kualitas pembelajaran yang tinggi. Sepertinya sulit untuk mencapai kualitas pendidikan yang baik tanpa dukungan biaya pendidikan yang memadai. Kedua faktor tersebut juga berpengaruh pada motivasi kerja guru dan kinerja sekolah secara umum dalam praktiknya.⁵

Model-model pembiayaan pendidikan perlu diketahui oleh pengelola pendidikan sebagai acuan dalam menjalankan kegiatan pendidikan. Pemilihan model pembiayaan akan mempengaruhi kebijakan yang ditetapkan oleh pengelola pendidikan. Semakin bijak dalam memilih model pembiayaan, pengelola akan semakin bijak dalam mengambil keputusan dan menentukan langkah-langkah pengembangan pendidikan. Model-model pembiayaan pendidikan bervariasi di berbagai negara. Setiap negara memiliki perbedaan dalam model pembiayaan pendidikan. Ada negara yang bertanggung jawab penuh terhadap pembiayaan pendidikan, sementara negara lain melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan. Pemilihan model pembiayaan ini akan mempengaruhi arah pengembangan institusi pendidikan.⁶

³ Ace Suryadi dan H.A.R Tilaar, *Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993).

⁴ Ade Sopiali, 'TEORI DAN KONSEP DASAR PEMBIAYAAN (COST) DALAM PENDIDIKAN ISLAM (Rencana, Organisasi, Pelaksanaan, Dan Pengawasan)', *Jurnal Intelegensia*, 06 (2018), 105.

⁵ Nurul Hidayati Murtafiah Saikul Huda, Muhammad Maliki, Imam Sadali, 'ANALISIS MODEL-MODEL MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LEMBAGA SEKOLAH', *UNISAN JOURNAL: JURNAL MANAJEMEN & PENDIDIKAN ISLAM*, 01 (2022), 170.

⁶ Amiruddin Siahaan Oktrigana Wirian, Nelly Agustina, 'Model-Model Pembiayaan Pendidikan', *Educate: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran*, 1 (2022), 45-46.

METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode studi kepustakaan (library research). Metode ini melibatkan pengumpulan data dari sumber-sumber pustaka, membaca, dan mengelola bahan penelitian. Oleh karena itu, dalam metode pengumpulan data, penelitian ini melibatkan kegiatan membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. Hal ini dilakukan dengan mengkaji, menelusuri, dan menelaah bahan literatur yang relevan dengan fokus pembahasan artikel ini, yaitu model-model pembiayaan pendidikan.

PEMBAHASAN

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berkualitas. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan proses pendidikan yang benar-benar bermutu dan berkualitas. Berbagai pihak, termasuk pemerintah, pengelola pendidikan, para pemangku kepentingan pendidikan, dan lain sebagainya, perlu bekerja sama secara sinergis untuk bertanggung jawab dalam meningkatkan mutu pendidikan. Semua pihak tersebut harus bersinergi untuk meningkatkan mutu pendidikan.⁷

Sumber pembiayaan pendidikan yang melimpah tidak menjamin peningkatan mutu jika tidak direncanakan dengan baik, salah sasaran, pengelolaan yang kurang tepat, kurangnya pengawasan, rendahnya akuntabilitas, sanksi yang tidak tegas terhadap penyelewengan, dan alasan lainnya dalam pengelolaan biaya pendidikan.⁸

Dibawah ini akan dijelaskan beberapa model pembiayaan dalam pendidikan:

1. Model Dana Bantuan Murni (Flat Grant Model)

Model pembiayaan ini adalah uang bantuan negara yang diberikan kepada sekolah di daerah tanpa mempertimbangkan kemampuan pembayaran pajak daerah setempat, berdasarkan jumlah siswa yang harus dididik. Kelebihan dari model ini adalah sekolah dapat mengalokasikan dana untuk kegiatan pembelajaran siswa dan memfasilitasi kegiatan pembelajaran. Namun, terdapat beberapa kekurangan, antara lain pemerintah tidak mendapatkan pajak sebagai sumber devisa negara, meningkatkan potensi penyimpangan dana pendidikan, dan menciptakan kesenjangan antara sekolah di daerah yang berbeda. Tujuan dari model ini adalah untuk menjaga sekolah dari kerusakan yang lebih parah, terutama di daerah yang miskin.

2. Model Landasan Perencanaan (Foundation Plan Model)

Merupakan model yang menggambarkan bahwa negara memberikan dana kepada daerah yang miskin lebih banyak untuk setiap siswa dibandingkan dengan daerah yang makmur, tanpa mempertimbangkan kekayaan dan pajak daerah. Kelebihan dari model ini adalah pengeluaran anggaran pendidikan yang efektif, efisien, dan akuntabel, serta pemerintah mendapatkan pajak sebagai sumber devisa negara. Namun, terdapat beberapa kekurangan, antara lain sekolah dapat

⁷ Achmad Anwar Abidin, 'MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TINGGI DALAM UPAYA PENINGKATAN MUTU (Studi Kasus Pada Perguruan Tinggi Swasta Menengah Di Surabaya)', *Jurnal Penjaminan Mutu*, 1 (2017), 87-99.

⁸ Mesiono dan Haidir, 'Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Analisis Konsep Dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan)', *Hikmah*, 2 (2020), 61-73.

- membatasi program kegiatan yang mendukung peningkatan mutu pendidikan, dan adanya potensi penyimpangan anggaran tahunan pendidikan.⁹
3. Model Perencanaan Pokok Jaminan Pajak (Guaranted Tax Base Plan)
Model yang membatasi dengan menentukan penafsiran penilaian per siswa yang menjadi jaminan negara, diperuntukkan bagi wilayah sekolah setempat. Bantuan negara berbeda antara apa yang diterima daerah per siswa dengan jaminan negara per siswa. Pembagian presentase bantuan sangat tinggi di sekolah distrik yang miskin, dan rendah di sekolah distrik yang kaya/sejahtera. Kelebihan Model Perencanaan Pokok Jaminan Pajak (Guaranted Tax Base Plan) adalah: (1) Jumlah pembiayaan pendidikan akan terperinci, (2) Pemerintah mendapat pajak sebagai sumber devisa Negara. Sedangkan Kekurangan Model Perencanaan Pokok Jaminan Pajak (Guaranted Tax Base Plan) adalah: (1) Hanya akan efektif dan efisien bagi negara distrik, (2) Terbatasnya pembiayaan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan.
 4. Model Persamaan Persentase (Percentage Equalizing Model)
Model ini diperkenalkan pada tahun 1920-an dan lebih berfokus pada menyediakan kontribusi yang diperlukan kepada setiap murid dan guru di daerah-daerah yang kurang berkembang. Dalam program ini, jumlah pembayaran yang disetujui dihitung berdasarkan kebutuhan masing-masing siswa, guru, atau komponen lainnya yang dibutuhkan. Jumlah yang diberikan bervariasi sesuai dengan kebutuhan yang ada.¹⁰ Keuntungan dari Model Persamaan Persentase adalah: (1) Penyaluran dana pendidikan yang besar ke sekolah-sekolah di daerah terpencil, (2) Peningkatan fasilitas dan infrastruktur sekolah di daerah-daerah terpencil, (3) Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan secara seragam di berbagai daerah. Namun, beberapa kelemahan dari Model Persamaan Persentase adalah: (1) Potensi terjadinya penyimpangan dalam alokasi pendanaan pendidikan, (2) Akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana pendidikan yang tidak terjamin.
 5. Model Perencanaan Persamaan Kemampuan (Power Equalizing Plan)
Model ini mendorong distrik yang lebih makmur untuk membayar pajak sekolah yang kemudian dikumpulkan oleh negara. Setelah itu, negara menggunakan dana dari distrik yang lebih makmur tersebut untuk memberikan bantuan kepada distrik yang lebih miskin. Kelebihan dari Model Perencanaan Persamaan Kemampuan adalah: (1) Adanya kesetaraan dalam perencanaan kemampuan pendanaan pendidikan, (2) Potensi peningkatan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah. Namun, kelemahan dari Model Perencanaan Persamaan Kemampuan adalah bahwa pemerintah tidak menerima pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara.
 6. Model Pendanaan Negara Sepenuhnya (Full State Funding Model)

⁹ dan Ngurah Ayu Nyoman Murniati Ekowati, Endang Tri, Sunandar, 'MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI SEKOLAH DASAR ISLAM AR RAHMAH KECAMATAN SURUH', *Jurnal Manajemen Pendidikan (JMP)*, 1 (2019).

¹⁰ dan Sugiyono Sugiyono Ramadhan, M. Agphin, 'Pengembangan Sumber Dana Sekolah Pada Sekolah Menengah Kejuruan', *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 3 (2015), 340-51.

Model ini bertujuan untuk mengurangi disparitas lokal dalam pengeluaran dan perpajakan. Dana sekolah akan dikumpulkan oleh pemerintah pusat dan diberikan ke sekolah distrik dengan basis yang setara. Prinsip keadilan terhadap siswa dan pembayar pajak dipegang teguh, sementara pendanaan pendidikan disesuaikan dengan tingkat kekayaan masing-masing. Tujuannya adalah untuk menghindari banyaknya anak dari keluarga miskin yang tidak melanjutkan pendidikan, yang dapat menyebabkan masalah pengangguran dan ketidakstabilan ekonomi bagi generasi berikutnya. Kelebihan dari Model Pendanaan Negara Sepenuhnya adalah: (1) Sekolah dapat mengalokasikan dana untuk kegiatan belajar siswa, (2) Fasilitas dan infrastruktur sekolah dapat ditingkatkan untuk mendukung pembelajaran, (3) Sekolah dapat memfasilitasi proses pembelajaran siswa. Namun, kelemahan dari Model Pendanaan Negara Sepenuhnya adalah: (1) Memerlukan anggaran pendanaan pendidikan yang signifikan dalam APBN, (2) Potensi terjadinya penyalahgunaan dalam alokasi dana pendidikan.

7. Model Sumber Pembiayaan (The Resources Cost Model)

Model ini dirancang oleh Hambers dan Parrish untuk menawarkan proses alokasi dana pendidikan yang memperhatikan kebutuhan unik dari situasi ekonomi di setiap wilayah. Menurut Sergivanni, model ini tidak terkait dengan pendapatan pajak atau kekayaan daerah tertentu. Kelebihan dari Model Biaya Sumber Daya adalah: (1) Sumber pendanaan yang diperoleh setiap daerah berbeda-beda, (2) Sekolah di daerah terpencil dapat meningkatkan kualitas pendidikan, (3) Sekolah dapat memfasilitasi pembelajaran siswa. Namun, kelemahan dari Model Biaya Sumber Daya adalah: (1) Potensi bagi sekolah untuk memungut biaya kepada siswa, (2) Adanya ketimpangan sosial antar daerah.

8. Model Surat Bukti / Penerimaan (Models of Choice and Voucher Plans)

Model ini mengalokasikan dana pendidikan secara langsung kepada individu atau keluarga berdasarkan permintaan untuk pendidikan. Mereka menerima voucher atau surat bukti penerimaan dana yang dapat digunakan untuk pendidikan, mencerminkan subsidi yang langsung diterima oleh murid yang membutuhkannya. Kelebihannya adalah: (1) Memberikan pilihan kepada sekolah dan orang tua untuk meningkatkan kualitas pendidikan, (2) Sekolah swasta mendapatkan bantuan dana pendidikan tambahan. Namun, kelemahannya adalah: (1) Potensi terjadinya ketidaksetaraan di antara sekolah negeri, (2) Potensi terjadinya penyalahgunaan dana pendidikan.

9. Model Rencana Bobot Siswa (Weight Student Plan)

Model ini mempertimbangkan berbagai jenis siswa berdasarkan kebutuhan mereka, seperti siswa dengan kecacatan, program kejuruan, atau kemampuan berbahasa ganda. Ada beberapa model dalam pendanaan pendidikan: Pertama, Model Berdasarkan Pengalaman (Historic Funding) atau yang dikenal sebagai Incrementalism, di mana sekolah menerima dana yang mencerminkan penerimaan tahun sebelumnya dengan sedikit penyesuaian. Kedua, Model Berdasarkan Usulan (Bidding Model), di mana sekolah mengajukan usulan dana dengan referensi tertentu kepada sumber dana, kemudian sumber dana mengevaluasi usulan tersebut dan menyesuaikannya dengan kriteria yang ditetapkan. Ketiga, Model Berdasarkan Kebijakan (Discretion Model), di mana

pihak yang menyediakan dana melakukan studi untuk menentukan komponen-komponen yang perlu mendapat bantuan berdasarkan prioritas setelah melakukan eksplorasi pada suatu daerah.

KESIMPULAN

Dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang unggul, pendidikan memiliki peran yang sangat penting. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, kualitas pendidikan harus ditingkatkan secara signifikan. Keterlibatan pemerintah, pengelola pendidikan, dan pihak-pihak terkait lainnya sangat diperlukan agar pendidikan dapat meningkat. Ketersediaan dana dalam jumlah besar saja tidak menjamin peningkatan mutu pendidikan. Pengelolaan dana yang kurang tepat, penyimpangan pengelolaan, rendahnya pengawasan, dan kurangnya akuntabilitas bisa menghambat kemajuan mutu pendidikan.

Sejumlah model pembiayaan pendidikan telah diusulkan untuk mengatasi permasalahan ini. Model-model tersebut mencakup berbagai pendekatan seperti pemberian dana berdasarkan jumlah siswa, alokasi berdasarkan tingkat kemakmuran suatu daerah, pengalokasian dana berdasarkan jaminan pajak, hingga model yang memberikan dana secara langsung kepada individu atau keluarga dengan surat bukti atau voucher. Setiap model memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri serta tujuan yang berbeda dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

Ada beberapa model seperti Model Dana Bantuan Murni, Model Landasan Perencanaan, Model Perencanaan Pokok Jaminan Pajak, Model Persamaan Persentase, Model Perencanaan Persamaan Kemampuan, Model Pendanaan Negara Sepenuhnya, Model Sumber Pembiayaan, Model Surat Bukti / Penerimaan, dan Model Rencana Bobot Siswa yang memiliki ciri khas dan dampaknya masing-masing dalam mengalokasikan dana pendidikan.

Setiap model ini mempertimbangkan berbagai faktor seperti tingkat kemakmuran, kebutuhan siswa, keadilan, pengelolaan dana, dan efektivitas serta efisiensi penggunaan dana pendidikan. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai model-model tersebut, diharapkan pihak-pihak terkait dapat memilih dan menerapkan model pembiayaan yang paling sesuai guna meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Achmad Anwar, 'MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TINGGI DALAM UPAYA PENINGKATAN MUTU (Studi Kasus Pada Perguruan Tinggi Swasta Menengah Di Surabaya)', *Jurnal Penjaminan Mutu*, 1 (2017), 87-99
- Ahmad Firdaus Al amien, Siti Julaiha, Muhammad Adam Dzuhri, 'PEMBIAYAAN PENDIDIKAN ISLAM; HISTORIS, PENGERTIAN, FUNGSI, DAN SUMBER', *Jurnal Syntax Transformation*, 2 (2021), 749-50
- Ananda Sholih Nasution, & Dewi Aryanti. (2023). Fostering Sincere Attitudes In Infaq And Charity According To Islamic Education. *LECTURES: Journal of Islamic and Education Studies*, 2(3), 127-139. <https://doi.org/10.58355/lectures.v2i3.35>

- Arief Firmansyah, & Amirudin. (2023). Understanding and History of the Development of Islamic Boarding Schools in Indonesia. *Al-Fadlan: Journal of Islamic Education and Teaching*, 1(2), 81–91. <https://doi.org/10.61166/fadlan.vii2.36>
- Dumyati. (2023). Problems of Vision and Mission and the Dichotomy of Knowledge in Islamic Education. *Maklumat: Journal of Da'wah and Islamic Studies*, 1(1), 31–40. <https://doi.org/10.61166/maklumat.viii.4>
- Ekowati, Endang Tri, Sunandar, dan Ngurah Ayu Nyoman Murniati, 'MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI SEKOLAH DASAR ISLAM AR RAHMAH KECAMATAN SURUH', *Jurnal Manajemen Pendidikan (JMP)*, 1 (2019)
- Haidir, Mesiono dan, 'Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Analisis Konsep Dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan)', *Hikmah*, 2 (2020), 61–73
- Oktrigana Wirian, Nelly Agustina, Amiruddin Siahaan, 'Model-Model Pembiayaan Pendidikan', *Educate: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran*, 1 (2022), 45–46
- Ramadhan, M. Agphin, dan Sugiyono Sugiyono, 'Pengembangan Sumber Dana Sekolah Pada Sekolah Menengah Kejuruan', *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 3 (2015), 340–51
- Ricky Yoseptry, Salmah, Muhammad Nasir and Idan Darmawan (2023) "Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Sekolah Dasar Negeri Cangkring 03 Bandung", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 6(2), pp. 553–566. doi: 10.31943/afkarjournal.v6i2.571.
- Saikul Huda, Muhammad Maliki, Imam Sadali, Nurul Hidayati Murtafiah, 'ANALISIS MODEL-MODEL MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LEMBAGA SEKOLAH', *UNISAN JOURNAL: JURNAL MANAJEMEN & PENDIDIKAN ISLAM*, 01 (2022), 170
- Sopiali, Ade, 'TEORI DAN KONSEP DASAR PEMBIAYAAN (COST) DALAM PENDIDIKAN ISLAM (Rencana, Organisasi, Pelaksanaan, Dan Pengawasan)', *Jurnal Intelegensia*, 06 (2018), 105
- Tilaar, Ace Suryadi dan H.A.R, *Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993)
- Usman, 'Urgensi Manajemen Pembiayaan Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah', *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*, 2 (2017), 219– 246
- Zakki, M., Eko, A., & Marsokan, P. (2023). Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan Sekolah Tinggi Agama Islam Al Falah (STAIFA) Pamekasan Dengan Pendekatan Bauran Pemasaran (Marketing Mix). *COMPETITIVE: Journal of Education*, 2(3), 137–147. <https://doi.org/10.58355/competitive.v2i3.31>